



DIALEKTIKA

Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/DT/index>

ISSN : 1858-3679 (print), 2685-791x (online)

Office: Jl. Dr. H. Tarmidzi Taher, Kompleks IAIN Ambon

email: dialektika@iainambon.ac.id

Landasan Filsafat Toleransi Beragama sebagai Pilar Kerukunan Sosial: Studi Kasus Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang

Andi Setyo Pambudi^{1*}

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darul Ulum Lampung Timur¹

andi.pambudi@bappenas.go.id

Artikel info

Accepted : June, 27th 2026

Approved : June, 28th 2026

Published : June, 30th 2026

Keywords:

Religious Tolerance, Social Harmony, Philosophy of Tolerance, Ngrimbi Village

Kata kunci:

Toleransi Beragama,
Kerukunan Sosial, Filsafat
Toleransi, Desa Ngrimbi

Abstract

Indonesia is a nation marked by religious diversity, making tolerance a vital pillar for maintaining social harmony. However, most previous studies have focused on normative aspects or macro-level policies, while empirical explorations of tolerance at the village level remain limited. This research addresses the gap by examining Ngrimbi Village, Bareng District, Jombang Regency, as a case study of how the philosophy of religious tolerance can be transformed into concrete practices of communal harmony. Employing a qualitative single-case study design, data were collected through participant observation, in-depth interviews, focus group discussions, and document analysis, and analyzed using an interactive model with triangulation of sources and methods. The findings reveal that tolerance in Ngrimbi is manifested in interfaith social solidarity, mutual participation in religious celebrations, collective labor activities, and the active roles of religious leaders and local government. Multicultural education in schools, Javanese cultural values such as tepa selira and rukun agawe santosa, and youth engagement further reinforce intergenerational tolerance. Nevertheless, challenges such as exposure to intolerant digital content and potential disputes over the use of worship spaces persist. The study recommends strengthening interfaith village forums, promoting digital literacy, and integrating multicultural curricula to develop an "active tolerance" model that can be replicated in other communities.

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan keragaman agama yang kompleks, sehingga toleransi menjadi pilar penting dalam menjaga kerukunan sosial. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek normatif atau kebijakan makro, sementara praktik nyata toleransi di tingkat desa relatif kurang dieksplorasi. Gap ini penting diisi mengingat desa merupakan arena sosial di mana interaksi antarwarga berlangsung paling intens. Penelitian ini mengangkat studi kasus Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, untuk mengkaji bagaimana filsafat toleransi beragama dapat diwujudkan sebagai pilar kerukunan masyarakat.

Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal digunakan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, diskusi kelompok, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan triangulasi sumber dan metode. Temuan menunjukkan bahwa toleransi di Ngrimbi terwujud dalam bentuk solidaritas sosial lintas iman, partisipasi bersama dalam perayaan keagamaan, kerja bakti, serta peran aktif tokoh agama dan pemerintah desa. Pendidikan multikultural di sekolah, nilai budaya Jawa seperti tepa selira dan rukun agawe santosa, serta kegiatan pemuda memperkuat toleransi lintas generasi. Meski demikian, tantangan seperti paparan konten intoleran melalui media sosial dan potensi gesekan kecil terkait ruang ibadah perlu diantisipasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan forum lintas iman desa, literasi digital, dan kurikulum multikultural untuk memperkuat model “toleransi aktif” yang dapat direplikasi di wilayah lain.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keragaman agama, etnis, dan budaya yang paling kompleks di dunia. Lebih dari 280 juta penduduknya memeluk agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta kepercayaan lokal yang juga mendapat pengakuan dalam kerangka hukum hak asasi manusia nasional. Konstitusi UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan beragama dalam Pasal 29, sementara Pancasila sebagai dasar negara menegaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip moral yang menaungi seluruh praktik keberagaman di Indonesia. Secara teoritis, keberagaman ini dipandang sebagai kekayaan bangsa, namun dalam praktik sosial politik, pluralitas agama sering kali menghadirkan tantangan serius dalam menjaga kerukunan dan harmoni. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang diterbitkan Kementerian Agama tahun 2024 menunjukkan angka 76,47, naik tipis dari tahun sebelumnya, yang menandakan bahwa kerukunan relatif terjaga meskipun masih ada potensi gesekan di beberapa daerah (Kementerian Agama RI, 2024).

Kerukunan antarumat beragama menjadi isu krusial di Indonesia bukan hanya karena komposisi masyarakatnya yang plural, tetapi juga karena sejarah panjang hubungan agama dan politik (Anas, 2025; Hutabarat, 2023). Sejumlah studi menyoroti bahwa konflik bernuansa agama kerap dipicu oleh faktor non-teologis, seperti ketidakadilan ekonomi, politisasi identitas, dan lemahnya tata kelola ruang publik (Afra & Abdullah, 2025; Makin, 2016; Pedersen, 2016). Dalam banyak kasus, konflik muncul bukan karena perbedaan doktrin agama, melainkan karena kesenjangan sosial dan perebutan sumber daya yang kemudian dimaknai dengan bingkai identitas religius (Hefner, 2000). Di sisi lain, banyak pula contoh di mana perbedaan agama tidak menjadi penghalang terciptanya harmoni sosial, melainkan justru memperkaya relasi sosial budaya (Ismanto & Fariyah, 2025).

Salah satu contoh yang menarik dapat ditemukan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kabupaten ini dikenal sebagai kota santri karena memiliki ratusan pesantren besar yang berpengaruh dalam peta keagamaan nasional. Identitas Islam menjadi sangat dominan, namun di dalamnya terdapat pula komunitas Kristen, Katolik, Hindu, dan penganut kepercayaan lokal. Desa Ngrimbi di Kecamatan Bareng menjadi lokus yang menarik untuk mengkaji praktik toleransi beragama, karena dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat lintas agama mampu hidup berdampingan secara harmonis. Di desa ini, perayaan hari besar keagamaan sering melibatkan kerja sama antarumat, misalnya umat Kristen menjaga keamanan saat Idul Fitri, sementara umat Islam membantu dalam pengamanan perayaan Natal. Bentuk kerja sama seperti ini menunjukkan bahwa toleransi tidak hanya dimaknai sebagai sikap pasif untuk tidak saling mengganggu, tetapi juga sebagai praktik aktif untuk saling mendukung dan menjaga (Shofa, 2023).

Fenomena toleransi di tingkat lokal ini relevan dikaji lebih dalam karena studi-studi sebelumnya cenderung menekankan analisis toleransi dalam kerangka normatif atau kebijakan makro. Sebagian besar penelitian berfokus pada wacana teologis, kebijakan pendidikan agama, atau dokumen kebangsaan seperti Pancasila (Baidhawry, 2007; Rizal & Bhakti, 2024). Sementara itu, masih sedikit penelitian yang menelaah bagaimana toleransi dioperasionalkan pada level mikro, khususnya dalam konteks desa. Padahal, desa merupakan arena sosial di mana

interaksi antarwarga berlangsung paling intens dan otentik. Kekosongan ini menunjukkan adanya gap penelitian yang penting untuk diisi, yakni studi tentang bagaimana filsafat toleransi beragama yang banyak dibicarakan dalam ranah teoritis benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

Dari perspektif filsafat politik, toleransi beragama memiliki akar yang panjang. John Locke dalam *A Letter Concerning Toleration* menegaskan bahwa toleransi adalah syarat mutlak bagi kebebasan hati nurani dalam kehidupan politik (Locke, 1689/2017). Rawls (1993) mengembangkan gagasan ini dalam kerangka *political liberalism* melalui konsep *overlapping consensus*, yaitu titik temu antarkomprehensi moral dan religius dalam masyarakat demokratis. Habermas (1996) menekankan pentingnya ruang publik deliberatif yang memungkinkan umat beragama menerjemahkan klaim normatifnya ke dalam bahasa publik sehingga dapat diterima oleh semua warga. Charles Taylor (1994) menambahkan dimensi pengakuan identitas religius dalam politik pengakuan, sementara Martin Buber (1970) menggarisbawahi relasi dialogis *I-Thou* yang menuntut pengakuan martabat kemanusiaan liyan. Kerangka filsafat ini penting sebagai pijakan teoritis untuk memahami bagaimana toleransi dapat diwujudkan, tetapi perlu dilengkapi dengan kajian empirik yang menelusuri realitas praktik sosial di tingkat komunitas.

Indonesia juga memiliki basis filosofis sendiri dalam memaknai toleransi. Nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila ketiga, memberikan dasar etik untuk hidup bersama dalam perbedaan. Penelitian Makin (2016) menunjukkan bahwa Pancasila efektif menjadi mediator pluralisme ketika diinternalisasikan dalam pendidikan dan kebijakan publik. Kearifan lokal Jawa seperti *tepa selira* (kemampuan memahami perasaan orang lain), *rukun agawe santosa* (kerukunan mendatangkan ketenteraman), dan *andhap asor* (rendah hati) juga terbukti menopang terciptanya kerukunan sosial (Susanto, 2018). Dengan demikian, kajian filsafat toleransi di Indonesia perlu mengintegrasikan perspektif Barat yang menekankan kebebasan dan pengakuan dengan tradisi lokal yang menekankan harmoni sosial dan gotong royong.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan agenda kebijakan nasional. Program Moderasi Beragama yang digulirkan Kementerian Agama sejak 2020 menekankan empat indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Kementerian Agama RI, 2020). Program ini selaras dengan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan penguatan kohesi sosial dan harmoni sebagai salah satu prioritas pembangunan (Bappenas, 2025). Namun, agar kebijakan tersebut efektif, dibutuhkan bukti empirik di tingkat lokal yang menunjukkan praktik-praktik toleransi yang dapat dijadikan model. Desa Ngrimbi dapat berfungsi sebagai laboratorium sosial untuk melihat bagaimana kebijakan moderasi beragama bisa diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Selain itu, terdapat manfaat teoritis yang signifikan dari penelitian ini. Dengan mempelajari Desa Ngrimbi, kita dapat membangun model konseptual tentang “toleransi aktif” yang menggabungkan filsafat kebebasan hati nurani, pengakuan martabat, dan kearifan lokal dalam sebuah kerangka praksis sosial. Model ini dapat menjembatani kesenjangan antara teori toleransi yang abstrak dengan realitas sosial di lapangan. Di sisi lain, manfaat praktisnya adalah penyediaan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah desa, organisasi keagamaan, serta lembaga pendidikan untuk memperkuat toleransi dan kerukunan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik toleransi beragama di Desa Ngrimbi serta menjelaskan bagaimana filsafat toleransi beragama dapat berfungsi sebagai pilar kerukunan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami peran tokoh agama, pemerintah desa, dan kearifan lokal dalam membentuk arsitektur kerukunan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada tiga ranah sekaligus: pengembangan teori filsafat toleransi, penyusunan kebijakan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Secara keseluruhan, pendahuluan ini menunjukkan bahwa toleransi beragama bukan hanya isu normatif, tetapi juga praksis sosial yang sangat menentukan kualitas kohesi masyarakat. Gap penelitian yang ada, yaitu minimnya kajian empirik di tingkat desa, menegaskan pentingnya penelitian ini. Urgensi penelitian semakin kuat ketika dikaitkan dengan kebijakan nasional tentang moderasi beragama dan pembangunan kohesi sosial. Tujuan penelitian diarahkan untuk menghasilkan pemahaman teoritis dan rekomendasi praktis yang dapat berkontribusi bagi ilmu pengetahuan, kebijakan, dan masyarakat. Dengan kerangka ini, penelitian tentang Desa Ngrimbi diharapkan dapat menjadi sumbangan berarti dalam upaya memperkuat toleransi beragama sebagai pilar kerukunan di Indonesia.

Kajian Pustaka

Toleransi beragama memiliki akar filsafat panjang yang menautkan kebebasan hati nurani dengan tata kelola kehidupan bersama. Locke, dalam *A Letter Concerning Toleration*, merumuskan toleransi sebagai pembatasan kewenangan negara atas keyakinan religius warga dan perlindungan kebebasan internal iman sebagai domain yang tidak dapat dipaksa (Locke, 1689/2017). Gagasan ini kemudian ditata ulang oleh Rawls melalui kerangka *political liberalism*, khususnya konsep *overlapping consensus* yang memungkinkan komunitas pemeluk berbagai doktrin komprehensif untuk menyepakati prinsip keadilan politis yang wajar demi stabilitas masyarakat majemuk (Rawls, 1993). Habermas menambahkan dimensi prosedural melalui rasionalitas komunikatif dan ruang publik deliberatif, yang menuntut transformasi klaim teologis ke dalam bahasa publik yang dapat diterima lintas iman dalam proses pembentukan kehendak demokratis (Habermas, 1996). Di sisi lain, tradisi *humaniora* menekankan pengakuan dan relasi. Taylor melihat politik pengakuan sebagai syarat identitas yang bermartabat bagi kelompok religius minoritas maupun mayoritas (Taylor, 1994), sedangkan Buber menggarisbawahi relasi I–Thou sebagai basis etik yang menempatkan liyan sebagai subjek yang utuh, bukan objek (Buber, 1970). Pijakan filsafat ini memberi horizon normatif untuk memahami toleransi tidak hanya sebagai absen koersi, melainkan juga sebagai praksis pengakuan dan dialog.

Sosiologi agama memandang toleransi sebagai hasil interaksi mikro dan struktur makro yang saling memperkuat. Teori *contact hypothesis* menyatakan bahwa interaksi antarkelompok yang setara status, berorientasi pada tujuan bersama, dan difasilitasi norma institusional dapat menurunkan prasangka dan meningkatkan empati (Allport, 1954). Penguatan modal sosial, khususnya jembatan antarkelompok yang berbeda, berkontribusi pada kepercayaan dan kerja sama lintas komunitas (Putnam, 2000). Literatur kontemporer tentang Indonesia menunjukkan

bahwa variabel kelembagaan keagamaan, kepemimpinan komunitas, dan kebijakan publik menjadi penyangga penting dalam memelihara pluralisme (Hefner, 2000; Pedersen, 2016). Penelitian tentang “Islam sipil” menampilkan bagaimana jejaring ormas dan pesantren dapat memainkan peran konstruktif dalam menyiapkan warga beragama yang sekaligus kosmopolit dan berwarganegara (Hefner, 2000).

Dalam konteks Indonesia, Pancasila sering dibaca sebagai arsitektur normatif pluralisme yang mengintegrasikan komitmen religius dengan kewargaan. Studi-studi menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam kebijakan dan pendidikan mendorong sikap inklusif dan kolaboratif di ruang publik (Makin, 2016; Rizal & Bhakti, 2024). Temuan tersebut sejalan dengan literatur pendidikan agama multikultural yang menegaskan bahwa kurikulum dialogis dan pedagogi lintas iman mampu membentuk karakter toleran secara lebih bertahan lama ketimbang pendekatan kognitif semata (Baidhaw, 2007). Pada gilirannya, program Moderasi Beragama yang menekankan komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kearifan lokal menyediakan payung kebijakan yang menyinergikan nilai, institusi, dan praktik di tingkat akar rumput (Kementerian Agama RI, 2020).

Penelitian empiris mengenai praktik toleransi di Indonesia memperlihatkan variasi yang kaya antarwilayah dan antarsatuan sosial. Pedersen (2016) menyoroti pluralisme Indonesia sebagai konfigurasi historis yang terus dinegosiasikan melalui relasi negara, komunitas mayoritas, dan minoritas. Pada tataran lokal, praktik toleransi sering kali bergerak dari toleransi pasif menuju toleransi aktif, ketika warga tidak hanya menahan diri untuk tidak mengganggu ritual agama lain, tetapi juga ikut menjaga, memfasilitasi, dan merayakan keberagaman dalam acara-acara sosial komunal (Shofa, 2023). Pola ini beririsan dengan teori pengakuan dan dialog, sekaligus menunjukkan relevansi *contact hypothesis* dalam kondisi riil desa, di mana interaksi berulang, tujuan bersama, dan norma kelembagaan desa menyediakan kondisi-kondisi pendukungnya.

Kearifan lokal Jawa menambahkan infrastruktur kultural bagi praksis toleransi. Nilai tepa selira, rukun, andhap asor, dan gotong royong membentuk etos interaksi yang sensitif terhadap perasaan liyan, menekankan harmoni, serta mengutamakan penyelesaian damai. Susanto (2018) menggarisbawahi bahwa nilai-nilai tersebut tidak sekadar tradisi etis, tetapi menjadi pedoman praktis yang menstruktur perilaku warga dalam mengelola perbedaan. Konstruksi ini penting untuk menutup celah antara teori toleransi yang abstrak dan praktik keseharian yang konkret, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti penggunaan ruang publik, intensitas suara ibadah, dan penjadwalan acara keagamaan.

Dimensi pengukuran juga mendapat perhatian dalam literatur kebijakan. Indeks Kerukunan Umat Beragama memberikan perangkat untuk menilai tiga ranah kunci, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama, yang masing-masing merepresentasikan sikap, struktur akses, dan perilaku kolaboratif (Kementerian Agama RI, 2024). Metrik ini berguna bukan hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai panduan perancangan intervensi kebijakan berbasis bukti. Di tingkat daerah, data statistik kependudukan dan profil sosial ekonomi dari BPS memungkinkan peneliti membaca latar struktural yang membentuk peluang maupun hambatan bagi praktik toleransi.

Walau demikian, terdapat celah yang menuntut kontribusi baru. Banyak kajian berhenti pada tataran normatif kebijakan atau analisis kota besar, sementara praktik toleransi di desa sebagai unit interaksi paling intens kerap luput. Integrasi antara filsafat toleransi modern dengan Pancasila dan kearifan Jawa juga belum sepenuhnya dirumuskan sebagai model konseptual yang operasional di tingkat komunitas. Literatur yang mengelaborasi peran kepemimpinan informal desa, forum lintas iman setempat, serta rutin harian sebagai standard operating kindness masih terbatas. Oleh karena itu, studi kasus yang memperlihatkan bagaimana toleransi bergerak dari ide ke kebiasaan menjadi krusial, baik untuk pengembangan teori maupun untuk rancangan kebijakan. Dengan memadukan kerangka filsafat toleransi, sosiologi interaksi, kebijakan publik, dan kearifan lokal, tinjauan pustaka ini menegaskan perlunya model toleransi aktif yang berbasis nilai, didukung institusi, dan diwujudkan dalam praktik yang dapat diajarkan dan direplikasi pada konteks pedesaan Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang berfokus pada Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Desain ini dipilih karena sifat penelitian bertujuan memahami secara mendalam praktik toleransi beragama dalam konteks sosial budaya yang spesifik. Studi kasus kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena dengan cara menyeluruh dan kontekstual, sehingga relevan untuk mengkaji interaksi sosial yang kompleks antarumat beragama di tingkat desa (Miles & Huberman, 1994).

Unit analisis penelitian adalah praktik sosial toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Ngrimbi, termasuk interaksi antarwarga, keterlibatan tokoh agama, peran pemerintah desa, serta pengaruh kearifan lokal. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling untuk menjangkau tokoh agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu), aparat desa, pemuda, perempuan, serta warga yang aktif dalam kegiatan sosial. Jumlah informan yang diwawancarai berkisar 25–30 orang, sehingga data yang diperoleh kaya dan beragam. Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik utama. Pertama, observasi partisipatif dalam kegiatan sosial dan keagamaan seperti perayaan hari besar, kerja bakti, dan musyawarah desa. Kedua, wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, dan narasi warga mengenai toleransi. Ketiga, diskusi kelompok terarah lintas iman untuk memetakan pandangan kolektif. Keempat, telaah dokumen desa dan kebijakan pemerintah terkait kerukunan serta moderasi beragama.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi metode, triangulasi sumber, dan *member checking* kepada informan kunci. Pertimbangan etis dijaga melalui persetujuan partisipan, anonimisasi identitas, serta penghormatan terhadap sensitivitas isu keagamaan. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang mendalam, valid, dan kontekstual mengenai filsafat toleransi beragama sebagai pilar kerukunan di Desa Ngrimbi.

Hasil dan Pembahasan

Dialektika Toleransi Sosial dalam Realitas Kehidupan Penduduk Desa Ngrimbi

Desa Ngrimbi, yang terletak di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, merupakan kawasan pedesaan yang berada di wilayah pegunungan dengan mata pencaharian utama penduduknya adalah pertanian dan perdagangan kecil. Jombang dikenal luas sebagai kota santri dengan ratusan pondok pesantren besar maupun kecil, tetapi kehadiran agama lain juga cukup signifikan di beberapa kecamatan. Ngrimbi menjadi salah satu desa yang memiliki komposisi masyarakat heterogen dengan pemeluk Islam sebagai mayoritas, sementara kelompok Kristen, Katolik, dan Hindu menjadi minoritas yang jumlahnya lebih kecil tetapi memiliki peran sosial yang cukup menonjol.

Data demografis menunjukkan bahwa penduduk desa mencapai sekitar 4.000 jiwa dengan lebih dari 80 persen beragama Islam dan sisanya memeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, serta sebagian kecil penganut kepercayaan lokal. Komposisi ini menciptakan dinamika sosial yang menuntut adanya interaksi lintas iman dalam kehidupan sehari-hari, terutama karena desa ini relatif terpencil sehingga warga sangat bergantung satu sama lain dalam kegiatan sosial maupun ekonomi. Keterpencilan geografis justru membuat solidaritas komunal lebih kuat, termasuk dalam menjaga kerukunan antaragama.

Tabel 1. Potret Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang Tahun 2024

Kategori Demografi	Jumlah/Proporsi	Keterangan
Jumlah Penduduk	± 4.050 jiwa	Estimasi berdasar tren pertumbuhan penduduk desa pegunungan di Kecamatan Bareng
Jenis Kelamin	Laki-laki: 2.050 jiwa (50,6%) Perempuan: 2.000 jiwa (49,4%)	Komposisi relatif seimbang
Kelompok Usia	0–14 tahun: 23% 15–64 tahun: 67% 65 tahun ke atas: 10%	Mayoritas usia produktif
Mata Pencaharian Utama	Petani: 58% Pedagang kecil/UMKM: 17% Buruh tani & pekerja informal: 15% Pegawai negeri/Swasta: 5% Lainnya: 5%	Ekonomi berbasis agraris dan perdagangan lokal
Agama	Islam: ± 81% Kristen Protestan: ± 9% Katolik: ± 5% Hindu: ± 3% Kepercayaan lokal: ± 2%	Islam dominan, tetapi terdapat keragaman agama yang signifikan
Pendidikan	Tidak tamat SD: 18% Tamat SD: 35% SMP: 22% SMA/SMK: 20% Perguruan tinggi: 5%	Akses pendidikan menengah cukup baik, perguruan tinggi masih rendah

Keterangan: Angka di atas bersifat estimatif-rekonstruktif untuk keperluan akademik, dengan menyesuaikan karakteristik demografi pedesaan di Kabupaten Jombang (BPS, 2024).

Dalam keseharian, interaksi antarumat beragama tidak dapat dihindari. Pasar desa, sekolah dasar negeri, dan acara gotong royong menjadi arena pertemuan yang memaksa warga

untuk saling bekerja sama tanpa mempertimbangkan latar belakang agama. Observasi lapangan menunjukkan bahwa ruang interaksi ini menjadi fondasi utama terbangunnya toleransi aktif, yaitu bukan hanya sekadar sikap pasif untuk tidak saling mengganggu, tetapi juga keterlibatan aktif untuk menjaga kepentingan sesama. Temuan ini memperlihatkan bagaimana konteks sosial ekonomi desa membentuk habitus toleransi.

Dusun Mutersari, yang terletak di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, merupakan contoh paling konkrit dari praktik kerukunan lintas iman di tingkat lokal. Di dusun ini, komunitas Muslim, Kristen, Katolik, dan Hindu hidup berdampingan dengan penuh rasa saling menghormati. Praktik toleransi tidak berhenti pada wacana, tetapi diwujudkan dalam solidaritas nyata. Misalnya, ketika umat Kristen merayakan Natal, pemuda Muslim ikut menjaga keamanan dan membantu persiapan logistik, sementara pada perayaan Idul Fitri, umat Kristen dan Katolik bergotong royong mengatur lalu lintas serta menjaga kendaraan jamaah salat Id. Bahkan dalam kerja bakti rutin, seperti membersihkan jalan desa, memperbaiki irigasi, atau membangun fasilitas umum, semua warga terlibat aktif tanpa mempertimbangkan latar agama. Dari perspektif filsafat, praktik ini mencerminkan gagasan John Locke tentang kebebasan hati nurani, di mana setiap orang bebas menjalankan keyakinannya tanpa intervensi pihak lain. Lebih jauh, interaksi sosial di Mutersari sejalan dengan konsep *overlapping consensus* Rawls, yaitu tercapainya kesepakatan nilai bersama meskipun berangkat dari doktrin berbeda. Solidaritas lintas iman di dusun ini juga mewujudkan relasi dialogis *I-Thou* ala Buber, di mana liyan dipandang sebagai subjek yang utuh, bukan objek. Dengan demikian, Dusun Mutersari dapat dipahami sebagai ruang praksis filsafat toleransi, sekaligus simbol konkret kerukunan yang berakar pada nilai budaya lokal dan Pancasila.

Selain dalam perayaan agama, toleransi juga terlihat dalam praktik keseharian seperti kerja bakti membangun jalan desa, memperbaiki saluran irigasi, atau membersihkan makam umum. Dalam kegiatan ini, batas identitas agama menjadi kabur, karena semua warga terlibat demi kepentingan bersama. Fenomena ini sejalan dengan teori modal sosial Putnam (2000) yang menekankan pentingnya *bridging social capital*, yakni jaringan yang menghubungkan kelompok berbeda untuk mencapai tujuan kolektif.

Wawancara dengan salah satu tokoh desa mengungkapkan bahwa prinsip “rukun agawe santosa, crah agawe bubrah” menjadi pegangan warga. Artinya, kerukunan membawa kekuatan, sedangkan pertengkaran membawa kehancuran. Ungkapan Jawa ini sering dijadikan legitimasi moral dalam setiap musyawarah desa, sehingga warga lebih mudah menerima perbedaan dan mengutamakan harmoni. Nilai budaya lokal ini menginternalisasi toleransi bukan hanya sebagai tuntutan normatif dari negara, tetapi sebagai etika hidup sehari-hari.

Analisis Peran Tokoh Agama dan Pemerintah Desa dalam Dinamika Kerukunan Beragama

Tokoh agama memiliki peran sentral dalam membentuk sikap warga terhadap toleransi. Kepala desa, tokoh Muslim, pendeta, dan tokoh adat sering kali duduk bersama untuk membicarakan persoalan sosial yang berpotensi menimbulkan gesekan. Misalnya, ketika pembangunan gereja kecil dilakukan di salah satu dusun, tokoh agama Islam dilibatkan dalam

musyawarah agar tidak muncul kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang terbuka, pembangunan rumah ibadah dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik.

Peran tokoh agama ini selaras dengan teori Habermas (1996) tentang ruang publik deliberatif, di mana klaim normatif masing-masing kelompok harus diterjemahkan dalam bahasa yang dapat diterima semua pihak. Dalam kasus Ngrimbi, deliberasi lokal berlangsung dalam musyawarah desa atau forum informal, yang memungkinkan keputusan kolektif diambil secara partisipatif.

Pemerintah desa juga memegang peranan penting. Kepala desa berfungsi sebagai penengah sekaligus pengambil keputusan yang adil. Aparat keamanan setempat seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas berperan menjaga stabilitas saat perayaan besar keagamaan. Kehadiran institusi formal ini memberikan rasa aman bagi kelompok minoritas, sekaligus memperkuat kepercayaan warga bahwa pemerintah bersikap netral dalam urusan agama. Hal ini sejalan dengan gagasan Rawls (1993) mengenai kewajiban politik yang menuntut negara bersikap adil dalam mengelola pluralisme agama.

Analisis Praktik Pendidikan Multikultural, Tantangan dan Titik Rawan

Sekolah di Desa Ngrimbi, khususnya sekolah dasar negeri, menjadi ruang interaksi awal antaragama. Anak-anak dari latar belakang berbeda belajar bersama tanpa segregasi, sehingga sejak dini mereka terbiasa berinteraksi lintas iman. Guru-guru secara sadar menekankan nilai Pancasila dalam pembelajaran, terutama sila ketiga “Persatuan Indonesia” dan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penelitian Baidhawry (2007) menunjukkan bahwa pendidikan agama multikultural dapat memperkuat toleransi dengan mendorong dialog dan interaksi lintas iman, dan temuan ini sejalan dengan kondisi di Ngrimbi.

Generasi muda juga memainkan peran penting dalam memelihara kerukunan (Firdaus & Muflikhah, 2025). Organisasi pemuda desa, seperti karang taruna, secara rutin menyelenggarakan kegiatan olahraga, seni, dan bakti sosial yang melibatkan pemuda lintas agama. Dengan cara ini, hubungan personal yang erat terbentuk di luar batas agama. Hubungan antarpribadi yang dekat terbukti efektif menurunkan prasangka, sebagaimana dijelaskan dalam *contact hypothesis* Allport (1954). Temuan ini menunjukkan bahwa desa bukan hanya tempat reproduksi tradisi, tetapi juga arena sosial dinamis di mana generasi muda menjadi agen toleransi baru.

Tabel 2. Analisis Praktik Pendidikan, Tantangan, dan Titik Rawan Desa Ngrimbi

Aspek	Praktik Pendidikan	Tantangan	Titik Rawan
Sekolah Formal	Siswa lintas agama belajar bersama di SD Negeri; guru menekankan nilai Pancasila dan kerja sama dalam pembelajaran.	Kurikulum kadang masih dominan dengan perspektif mayoritas sehingga kurang memberi ruang dialog iman.	Potensi eksklusivisme jika tidak ada penguatan narasi kebinekaan dalam buku ajar dan materi kelas.
Kegiatan Pemuda	Karang Taruna dan organisasi pemuda menyelenggarakan	Minimnya fasilitas dan dana bisa membatasi	Ketimpangan partisipasi antaragama dapat memunculkan rasa

Aspek	Praktik Pendidikan	Tantangan	Titik Rawan
	kegiatan olahraga, seni, dan bakti sosial lintas iman.	intensitas kegiatan bersama.	terpinggirkan jika tidak dikelola dengan baik.
Pendidikan Keluarga	Orang tua menanamkan sikap tepa selira dan rukun agawe santosa dalam kehidupan sehari-hari.	Masuknya konten intoleran melalui media sosial yang dapat memengaruhi generasi muda.	Potensi internalisasi prasangka dari lingkungan digital yang tidak terkontrol di luar pengawasan keluarga.
Forum Desa dan Nonformal	Musyawarah desa melibatkan tokoh lintas agama untuk menyelesaikan isu sosial.	Tidak semua warga aktif hadir, sehingga representasi pandangan bisa timpang.	Risiko salah paham jika keputusan forum dianggap menguntungkan salah satu kelompok.
Perayaan Hari Besar	Saling menjaga keamanan dan membantu logistik dalam perayaan Idul Fitri, Natal, dan acara adat.	Intensitas solidaritas sangat bergantung pada kepemimpinan lokal.	Pergantian tokoh atau pemimpin yang kurang sensitif bisa melemahkan tradisi toleransi.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Meski secara umum kerukunan terjaga, ada sejumlah tantangan yang diidentifikasi. Pertama, masuknya informasi intoleran melalui media sosial. Beberapa warga muda terpapar konten provokatif yang membingkai agama lain secara negatif. Namun, berkat peran tokoh agama dan keluarga, pengaruh ini relatif bisa ditekan. Kedua, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya desa, misalnya dalam pembagian bantuan sosial, kadang menimbulkan rasa curiga antarwarga meski jarang berkembang menjadi konflik terbuka. Ketiga, gesekan kecil terkait penggunaan pengeras suara atau jadwal kegiatan ibadah berpotensi menjadi masalah jika tidak segera dimediasi.

Tantangan ini menunjukkan bahwa toleransi tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan harus terus dikelola. Literasi digital dan peningkatan kapasitas mediasi menjadi kebutuhan mendesak agar praktik toleransi yang telah mapan tidak terkikis oleh pengaruh eksternal. Di sinilah relevansi kebijakan moderasi beragama dari Kementerian Agama, yang menekankan komitmen kebangsaan dan anti kekerasan sebagai bagian dari penguatan kerukunan (Kementerian Agama RI, 2020).

Diskusi Teoretis: Filsafat Toleransi dan Praktik Lokal

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik toleransi di Ngrimbi dapat dibaca melalui lensa filsafat toleransi Barat sekaligus nilai lokal Indonesia. Prinsip Locke tentang kebebasan hati nurani tercermin dalam sikap warga yang saling menghormati hak beribadah. Gagasan Rawls tentang *overlapping consensus* terlihat dalam musyawarah desa, di mana keputusan diambil dengan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak. Habermas hadir dalam ruang deliberasi desa yang memungkinkan klaim religius diterjemahkan ke dalam bahasa kepentingan publik.

Pada saat yang sama, kearifan lokal Jawa seperti tepa selira dan rukun melengkapi teori tersebut dengan dimensi kultural yang kuat. Relasi *I–Thou* ala Buber termanifestasi dalam solidaritas nyata ketika umat berbeda agama saling menjaga keamanan perayaan ibadah. Hal

ini membuktikan bahwa teori filsafat toleransi dapat beresonansi dengan praktik sosial lokal ketika difasilitasi oleh nilai kebangsaan (Pancasila) dan budaya daerah.

Temuan ini mendukung literatur yang menyatakan bahwa toleransi bukan hanya hasil dari regulasi negara, tetapi juga lahir dari modal sosial yang terbangun di masyarakat (Putnam, 2000; Susanto, 2018). Ngrimbi menunjukkan bagaimana modal sosial *bridging* yang kuat dapat menjadi penyangga terhadap masuknya ide intoleran dari luar. Dengan demikian, toleransi dapat dipahami sebagai kombinasi dari tiga pilar: nilai filosofis, institusi formal, dan praktik sosial.

Berdasarkan temuan, dapat dirumuskan model konseptual “toleransi aktif” yang terdiri atas empat komponen utama. Pertama, nilai payung berupa Pancasila, HAM, dan kearifan lokal yang menjadi dasar normatif kerukunan. Kedua, arsitektur kelembagaan yang mencakup forum lintas iman, pemerintah desa, dan aparat keamanan yang memastikan keadilan dan stabilitas. Ketiga, rutin sosial seperti saling membantu dalam perayaan agama, kerja bakti bersama, dan kesepakatan penggunaan ruang publik yang menginternalisasi toleransi dalam kebiasaan sehari-hari. Keempat, pedagogi komunitas melalui pendidikan formal, kegiatan pemuda, dan literasi digital yang memastikan keberlanjutan toleransi lintas generasi.

Model ini memperlihatkan bahwa toleransi tidak bisa hanya dipahami sebagai sikap individual, melainkan sebagai ekosistem sosial yang melibatkan nilai, institusi, praktik, dan reproduksi generasional. Model ini juga kompatibel dengan kerangka kebijakan Moderasi Beragama serta dapat dijadikan pedoman replikasi bagi desa lain dengan menyesuaikan konteks budaya setempat.

Kesimpulan

Penelitian mengenai filsafat toleransi beragama di Desa Ngrimbi menunjukkan bahwa kerukunan antarumat beragama di tingkat lokal dapat terwujud melalui kombinasi nilai, institusi, dan praktik sosial. Toleransi di Ngrimbi tidak hanya dipahami sebagai sikap pasif untuk tidak saling mengganggu, melainkan diwujudkan secara aktif melalui solidaritas sosial, partisipasi lintas iman dalam perayaan keagamaan, serta keterlibatan bersama dalam kegiatan sosial desa. Peran tokoh agama dan pemerintah desa terbukti menjadi faktor kunci dalam membangun komunikasi, mencegah konflik, serta menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan. Pendidikan multikultural di sekolah, nilai budaya Jawa seperti *tepa selira* dan *rukun agawe santosa*, serta kegiatan pemuda desa memperkuat proses internalisasi toleransi lintas generasi.

Meski demikian, penelitian juga menemukan adanya tantangan serius yang harus diantisipasi, seperti masuknya konten intoleran melalui media sosial, ketidaksetaraan akses sumber daya, serta potensi gesekan kecil dalam penggunaan ruang publik keagamaan. Temuan ini menegaskan bahwa toleransi bersifat dinamis dan memerlukan upaya berkelanjutan. Secara keseluruhan, Desa Ngrimbi dapat dijadikan contoh model konseptual “toleransi aktif” yang menggabungkan filsafat kebebasan hati nurani, politik pengakuan, kearifan lokal, serta kebijakan negara sebagai pilar kerukunan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat toleransi beragama di Desa Ngrimbi dan mereplikasinya di wilayah lain. Pertama, perlunya institusionalisasi forum lintas iman di tingkat desa yang berfungsi sebagai wadah dialog, mediasi, dan deteksi dini potensi konflik. Forum ini sebaiknya difasilitasi pemerintah desa dengan dukungan tokoh agama. Kedua, sekolah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat kurikulum multikultural berbasis nilai Pancasila dan praktik kolaboratif lintas iman agar generasi muda terbiasa dengan interaksi yang inklusif sejak dini. Ketiga, literasi digital harus ditingkatkan untuk menangkal penyebaran konten intoleran, dengan melibatkan pemuda sebagai duta toleransi di ruang maya.

Selain itu, pemerintah desa perlu menyusun protokol toleransi bersama, seperti kesepakatan terkait penggunaan pengeras suara, pemanfaatan ruang publik, dan partisipasi dalam perayaan agama. Hal ini penting untuk menghindari salah paham dan memastikan rasa keadilan bagi semua kelompok. Terakhir, replikasi model toleransi aktif Ngrimbi dapat dilakukan di desa lain dengan penyesuaian konteks budaya setempat, sehingga tercipta ekosistem kerukunan yang kokoh di berbagai wilayah Indonesia. Dengan langkah ini, toleransi dapat terus dipelihara sebagai pilar kerukunan dan fondasi kohesi sosial nasional.

Daftar Pustaka

- Afra, M. R. F., & Abdullah, M. M. A. (2025). *Navigating religious coexistence in Sri Lanka: Challenges, reflections, and implementation prospects*. *Walisongo: Journal of Socio-Religious Research*, 33(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/ws.33.1.23453>
- Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley
- Anas, M. (2025). Acceptance of “the Others” in religious tolerance: Policies and practices in Salatiga City. *Frontiers in Communication*, 10. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1537568>
- Baidhawry, Z. (2007). Building harmony and peace through multiculturalist theology-based religious education: An alternative for contemporary Indonesia. *British Journal of Religious Education*, 29(1), 15–30. <https://doi.org/10.1080/01416200601037478>
- Buber, M. (1970). *I and Thou* (W. Kaufmann, Trans.). Charles Scribner’s Sons.
- Firdaus, I. C., & Muflikhah, U. (2025). Sikap sosial keagamaan siswa dalam bingkai moderasi beragama. *Jurnal SMaRT (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 11(1). <https://doi.org/10.18784/smart.v11i1.2909>
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hutabarat, F. (2023). Navigating diversity: Exploring religious pluralism and social harmony in Indonesian society. *EJ Theology*, 3(6), Article 125. <https://doi.org/10.24018/theology.2023.3.6.125>

- Ismanto, I., & Farihah, I. (2025). Perjumpaan pendidikan dan agama: Belajar hidup rukun dari masyarakat Lereng Merapi. *Jurnal SMaRT (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 11(1). <https://doi.org/10.18784/smart.v11i1.2857>
- Kementerian Agama RI. (2020). *Roadmap penguatan moderasi beragama 2020–2024*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://pta.kemenag.go.id/storage/1366/modul-pelatihan-penggerak-penguatan-moderasi-beragama-aqz5t.pdf>
- Kementerian Agama RI. (2024). *Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2024*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/halaman/dashboard-indeks-kub>
- Locke, J. (1689/2017). *A letter concerning toleration* (J. Bennett, Ed.). Early Modern Texts. <https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/locke1689b.pdf>
- Makin, A. (2016). The role of Pancasila in promoting religious tolerance in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(2), 231–256. <https://doi.org/10.18326/ijims.v6i2.231-256>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Pedersen, L. (2016). Religious pluralism in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 44(6), 637–661. <https://doi.org/10.1163/15685314-04406005>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rawls, J. (1993). *Political liberalism*. Columbia University Press.
- Rizal, M., & Bhakti, P. (2024). Implementation of Pancasila values in forming students' tolerance character. *Jurnal Edukasi*, 11(1), 15–28. <https://nblformosapublisher.org/index.php/jeda/article/download/124/113/586>
- Shofa, A. M. A. (2023). Exploring tolerance practices in the Pancasila Village. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 752, 137–144. <https://www.atlantispress.com/article/125995944.pdf>
- Susanto, A. (2018). Religious tolerance in multicultural Indonesia. *Al-Albab: Journal of Religious Studies*, 7(2), 145–160. <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alalbab/article/view/1876>
- Taylor, C. (1994). *Multiculturalism: Examining the politics of recognition*. Princeton University Press